

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA PROGRAM MAHASISWA WIRUSAHA (PMW) UNDIKSHA DIDANAI TAHUN 2019

¹Kade Wiwik Antari, ²Nyoman Ari Surya Darmawan
Program Studi S1 Akuntansi
Jurusan Ekonomi dan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: wiwik.antari@gmail.com, arisuryadharmawan@undiksha.ac.id

Abstrak

Program Mahasiswa Wirausaha adalah program kewirausahaan di perguruan tinggi yang ditujukan kepada mahasiswa dengan pemberian fasilitas berupa bantuan permodalan dan pendampingan usaha agar mahasiswa mampu membangun usaha sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap akuntabilitas pengelolaan dana Program Mahasiswa Wirausaha di Undiksha tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi yang selanjutnya dianalisis melalui tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Aspek yang dianalisis adalah beberapa tahapan pengelolaan keuangan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban serta tahap pengawasan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan dana Program Mahasiswa Wirausaha, mahasiswa belum menerapkan prinsip akuntabilitas karena dalam pembuatan laporan mahasiswa masih meninggikan jumlah pengeluaran, memanipulasi jumlah penjualan dan membuat dokumen transaksi fiktif.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan, Mahasiswa

Abstract

Student's Entrepreneurship Program is a program for college which aimed for student by providing facilities in the form capital assistance and business assistance so that students are able to build their own businesses. This research aims to reveal the accountability of Student's Entrepreneurship Program management funds in Undiksha. This research used qualitative approach. Data obtained by interviews, observation, and documentation studies, then analyzed through stages namely data reduction, data display, and conclusion drawing. The analyzed aspects are several steps of financial management namely planning step, actuating step, reporting and responsibility step, and controlling step. The result of the research is that management funds of Student's Entrepreneurship Program, students haven't yet applied the accountability principle because in reporting step, student still increase the expenditure amount, manipulate sales amount, and create fiction transaction documents.

Keywords: Accountability, Management Funds, Students

PENDAHULUAN

Perusahaan publik dalam menjalankan kegiatannya tidak dapat terlepas dari penerapan Good Governance. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 menyatakan bahwa *Good Governance* memiliki prinsip-prinsip diantaranya profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Penting bagi sektor publik untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut karena sektor publik pada dasarnya tidak berorientasi pada profit melainkan pelayanan. Semua prinsip dalam *Good Governance* penting untuk diterapkan, namun akuntabilitas memiliki peranan yang cukup sensitif jika dibandingkan dengan prinsip yang lainnya. Hal ini dikarenakan akuntabilitas mengacu pada pelaporan serta pertanggungjawaban setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh sektor publik.

Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) sebagai organisasi sektor publik dalam menjalankan operasional kegiatannya harus menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Menurut Adisasmita (2011:30), akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 dalam BAB V tentang Pembiayaan dalam pasal 10 ayat 2 menjelaskan bahwa penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Semua kegiatan kemahasiswaan harus dipertanggungjawabkan dengan baik termasuk program kewirausahaan seperti Program Mahasiswa Wirausaha (PMW).

Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) merupakan suatu program rutin yang dilaksanakan oleh Undiksha sejak tahun 2009 yang merupakan program kewirausahaan dengan pemberian fasilitas berupa pemberian permodalan dan pendampingan usaha, Tujuan utama dilaksanakannya PMW adalah agar mampu mengubah pola pikir mahasiswa dari pencari kerja (job seeker) menjadi pencipta lapangan pekerjaan (job creator) serta

menjadi pengusaha yang tanggu dan sukses menghadapi persaingan global. Tercatat jumlah dana yang diberikan kepada mahasiswa dalam program PMW pada tahun 2019 sebesar Rp. 150 juta yang diberikan kepada 39 tim yang telah dinyatakan lulus seleksi dan mahasiswa juga diharuskan untuk membuat laporan atas dana yang diterima tersebut.

Meskipun telah dilaksanakan sejak tahun 2009, ternyata pelaksanaan PMW masih mengalami suatu permasalahan khususnya dalam pelaporan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa masih ada mahasiswa yang tidak mengumpulkan laporan sebagai pertanggungjawaban atas dana yang diterima dan dalam pembuatan laporan mahasiswa juga tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan panitia pelaksana PMW. Belum adanya pengawasan yang maksimal dalam pengelolaan dana PMW menjadi alasan masih ditemui kesalahan dalam pembuatan laporan penggunaan dana PMW. Adanya temuan tersebut mengakibatkan akuntabilitas pengelolaan dana PMW Undiksha didanai tahun 2019 diragukan kebenarannya. Terlebih lagi penelitian tentang pengelolaan dana PMW belum pernah dilakukan di Undiksha. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengungkap akuntabilitas pengelolaan dana Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Undiksha didanani tahun 2019.

METODE

Ditinjau dari sifat dan tujuannya, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini dirancang dari ditemukannya fenomena tentang pengelolaan dana PMW di Undiksha, kemudian dilanjutkan dengan menyusun latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, selanjutnya menelaah kajian pustaka dan melakukan metode pengumpulan data lalu menganalisis. Setelah mendapatkan hasil penelitian kemudian diambil sebuah kesimpulan. Lokasi penelitian ini adalah Universitas Pendidikan Ganesha dan mahasiswa penerima dana PMW telah bersedia dimintai informasi terkait dengan

pengelolaan keuangan PMW. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa hasil wawancara peneliti dengan informan dan data sekunder berupa laporan kemajuan dan laporan akhir yang diperoleh dari UPT PKKMs selaku panitia pelaksana PMW. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara mendalam kepada mahasiswa penerima dana PMW tahun 2019 dan panitia pelaksana PMW, observasi dengan mengikuti proses monitoring yang dilakukan kepada usaha rintisan PMW dan studi dokumentasi berupa analisis terhadap laporan kemajuan dan laporan akhir PMW. Data yang diperoleh diolah dengan metode analisis data menurut Sugiyono (2017) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Pengelolaan Dana PMW di Undiksha

Dalam pelaksanaan program, mahasiswa dituntut untuk memberikan suatu pertanggungjawaban atas program yang telah diterima. Wujud dari pertanggungjawaban mahasiswa atas PMW dibuktikan dengan adanya laporan kemajuan maupun laporan akhir. Adanya dua jenis laporan yang harus dibuat oleh mahasiswa mengikuti dari proses pencairan dana yang telah dibuat oleh panitia PMW, yang mana pencairan dana PMW dibagi menjadi dua tahap yaitu 70 persen dan 30 persen. Pada pencairan tahap pertama sebesar 70 persen, maka mahasiswa harus membuat laporan kemajuan dan untuk pencairan dana tahap kedua yang sebesar 30 persen, mahasiswa harus membuat laporan akhir. Hal ini mengikuti dari prosedur yang telah dibuat oleh panitia PMW di setiap tahunnya. Adanya laporan yang dibuat oleh mahasiswa bertujuan untuk menilai perkembangan usaha yang telah dilaksanakan dan memastikan bahwa dana yang diterima mahasiswa telah dikelola dengan baik. Adapun usaha yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu *Banana Chips Lezat*, *Rumah Kayu Singaraja*, *Carrotbit*, *Spesial Coffee Campus Baliaga*, dan *Chorros Riang Gembira*.

Semua perkembangan program yang dilaksanakan oleh mahasiswa melalui PMW akan diawasi secara berkala melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh panitia pelaksana PMW. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mendatangi usaha rintisan PMW yang pelaksanaannya dilakukan sebanyak dua kali. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui perkembangan program yang dilaksanakan oleh mahasiswa dan sekaligus memberikan pendampingan usaha apabila tim pelaksana PMW mengalami masalah ataupun kesulitan dalam pelaksanaan PMW. Dengan demikian kualitas program akan dapat dijamin keberhasilannya.

Analisis Pengelolaan Dana PMW di Undiksha

Pengelolaan dana PMW dapat dianalisis kedalam beberapa tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban serta tahap penawasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan mahasiswa penerima dana PMW tahun 2019 dan UPT PKKMs selaku panitia pelaksana PMW, diketahui bahwa proses pengelolaan PMW dimulai dari proses seleksi, dilanjutkan dengan pencairan dana 70 persen, pelaksanaan usaha, monitoring dan evaluasi tahap I, membuat laporan kemajuan, monitoring dan evaluasi tahap II, pencairan dana 30 persen, dan terakhir membuat laporan akhir.

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan jika dikaitkan dengan pengelolaan dana PMW, merujuk pada penyusunan rencana bisnis yang dilakukan oleh mahasiswa pengusul PMW. Sebelum dinyatakan menerima pendanaan PMW, mahasiswa terlebih dahulu harus membuat suatu rencana bisnis yang dituangkan kedalam proposal. Pada rencana bisnis akan termuat gambaran umum mengenai usaha yang akan dirintis, prospek pendapatan dan keuangan pada masa mendatang, keanggotaan pelaksana usaha dan rencana anggaran yang diperlukan dalam merintis usaha. Selanjutnya mahasiswa akan mengikuti suatu proses seleksi dalam dua tahap yaitu seleksi *in-statik* dan seleksi *in-dinamik*. Setelah dinyatakan lulus seleksi dan

dinyatakan berhak menerima pendanaan PMW, mahasiswa akan menandatangani kontrak dengan pihak UPT PKK M agar dana yang diterima oleh mahasiswa digunakan sepenuhnya untuk merintis usaha.

Meskipun sudah dinyatakan lulus seleksi, bukan berarti dana yang diterima oleh mahasiswa sama persis dengan jumlah dana yang diusulkan pada rencana bisnis yang dirancang sebelumnya. Panitia pelaksana PMW akan meninjau lebih lanjut dana yang bisa diterima oleh mahasiswa mengikuti jenis usaha yang dijalankan dan jumlah anggaran yang dimiliki oleh lembaga terkait dengan pelaksanaan PMW. Sehingga setelah dinyatakan lulus seleksi, mahasiswa kembali membuat suatu rancangan anggaran yang menyesuaikan dengan jumlah dana yang disetujui oleh panitia PMW berdasarkan hasil seleksi tersebut.

Adanya perubahan jumlah dana yang diterima dari PMW dengan jumlah dana yang diusulkan sebelumnya menimbulkan masalah tersendiri bagi mahasiswa penerima PMW. Masalah ini muncul karena dana yang diterima tidak cukup untuk merintis usaha. Seperti yang dialami oleh usaha *Spesial Coffee Campus Bali Aga* yang menerima penurunan jumlah dana yang signifikan. Hal ini disampaikan oleh Komang Ayu Sulastri selaku anggota pelaksana PMW dengan judul usaha *Spesial Coffee Campus Bali Aga* yang mengungkapkan bahwa dana usaha yang diterima dari program PMW tidak mencukupi untuk merintis usaha. Padahal awalnya dalam proposal dana yang diusulkan mencapai Rp 8 juta, namun yang disetujui oleh panitia hanya Rp 3 juta. Perbedaan jumlah dana ini membuat tim kesusahannya dalam merintis usaha.

Selain usaha *Coffee Campus Bali Aga*, usaha lainnya juga mengaku keberatan dengan pemotongan jumlah dana yang diterima tersebut. Meskipun demikian, tidak ada yang bisa dilakukan oleh mahasiswa karena sudah merupakan keputusan dari pihak panitia pelaksana PMW. Oleh karena itu, agar dana yang diterima cukup untuk merintis usaha, mahasiswa memilih untuk tidak membeli beberapa alat usaha yang mahal dan

memilih untuk meminjam atau menyewa atau bahkan menggunakan peralatan pribadi untuk menunjang usaha. Itu dilakukan agar dana yang diterima cukup untuk merintis usaha.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah tahap mahasiswa memulai merintis usaha dan merupakan realisasi terhadap dana yang diterima oleh mahasiswa. Setelah mendapatkan pendanaan, mahasiswa wajib melaksanakan usaha yang telah diusulkan sebelumnya sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani oleh mahasiswa. Meskipun pelaksanaan usaha telah dimuat dalam kontrak antara mahasiswa dan pihak lembaga, bukan berarti pelaksanaan usaha PMW sudah dilaksanakan dengan maksimal. Dana yang diterima dari PMW tidak sepenuhnya digunakan untuk merintis usaha. Mahasiswa cenderung berusaha menghemat pengeluaran dengan tidak membeli alat-alat produksi sehingga dana yang diterima bisa dibagi kepada anggota pelaksana usaha. Tidak dibelinya alat produksi ini kemudian akan berpengaruh terhadap pelaksanaan usaha, karena usaha akan kesulitan beroperasi tanpa adanya suatu alat produksi yang memadai.

Dalam pelaksanaan usaha, mahasiswa juga tidak serius dalam memasarkan produksinya. Kesibukkan kuliah menjadi alasan mahasiswa tidak serius menjalankan usahanya. Disamping itu, mahasiswa menganggap bahwa pelaksanaan usaha hanya sebagai bukti bahwa usaha mereka sudah jalan tanpa memperhitungkan keberlanjutan usaha yang dirintis tersebut. Sehingga banyak dari usaha PMW hanya melaksanakan usaha sebagai formalitas dan setelah serangkaian pengewasan yang dilakukan oleh panitia pelaksana PMW selesai dilakukan, usaha rintisan PMW tidak lagi beroperasi. Pelaksanaan usaha rintisan PMW juga sangat tidak sesuai dengan rencana bisnis yang telah dibuat oleh mahasiswa sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara lima usaha yaitu usaha *Banana Chips Lezat*, *Chorros Riang Gembira*, *Rumah Kayu Singaraja*, *Carrotbit* dan *Coffee Campus Baliaga*. Dari hasil wawancara tersebut diungkap bahwa

pelaksanaan usaha PMW masih belum maksimal. Tidak semua dana yang diterima digunakan untuk merintis usaha, bahkan jika dilihat dari media promosi sudah terlihat bahwa mahasiswa tidak menjalankan usaha dengan baik. Minimnya pelaksana usaha PMW tidak terlepas dari proses perencanaan yang tidak baik dan pengawasan yang sangat longgar sehingga mahasiswa tidak memiliki batasan dalam menjalankan usaha dan cenderung tidak serius dalam merintis usaha. Disamping itu, niat awal mahasiswa dalam mengikuti PMW tidak murni didorong oleh keinginan merintis usaha, melainkan tergiur dengan dana yang diterima. Oleh karenanya mahasiswa sebisa mungkin untuk tidak sepenuhnya menggunakan dana untuk menjalankan usaha agar dana tersebut bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

Dari kelima usaha tersebut, hanya Rumah Kayu Singaraja yang masih beroperasi hingga saat ini. Ini pun dikarenakan usaha Rumah Kayu Singaraja sudah beroperasi sebelum mendapat pendanaan PMW. Sedangkan usaha yang murni rintisan dari PMW tidak mampu berjalan dengan baik. Dilihat dari upaya mahasiswa untuk menghemat dana dengan tidak membeli alat yang dibutuhkan dalam proses produksi menunjukkan bahwa mahasiswa tidak serius dalam menjalankan usaha. Usaha PMW bukan suatu usaha yang hanya berlangsung selama sehari ataupun dua hari melainkan merupakan usaha yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, sehingga harus memiliki alat sendiri untuk produksi. Terlebih lagi, lembaga telah memberikan suatu modal berupa pendanaan untuk membiayai segala keperluan dalam merintis usaha dalam program PMW ini.

3. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Laporan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap dana yang diterima. Pertanggungjawaban dilakukan dengan mengumpulkan laporan kemajuan dan laporan akhir kepada pihak UPT PKK. Ketika dalam tahap pelaksanaan mahasiswa tidak menggunakan keseluruhan dana yang diterima untuk merintis usaha,

maka hal ini akan berpengaruh terhadap pelaporan yang dilakukan oleh mahasiswa. Diketahui bahwa dalam membuat laporan mahasiswa harus melampirkan dokumen transaksi sebagai bukti dana yang diterima digunakan untuk merintis usaha. Namun karena dana yang diterima tidak keseluruhan digunakan untuk merintis usaha, maka mahasiswa akan membuat dokumen transaksi fiktif untuk melengkapi laporannya. Ini dilakukan mahasiswa untuk menutupi fakta bahwa dana yang diterima tidak sepenuhnya digunakan untuk merintis usaha dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi.

Penyebab lain mahasiswa membuat dokumen fiktif pada laporan adalah karena tidak semua tempat pembelian bahan baku menyediakan nota dokumen yang sah. Seperti yang dialami oleh usaha *Banana Chips Lezat* yang membuat dokumen fiktif untuk melengkapi laporan karena pada saat pembelian bahan baku berupa pisang tidak mendapatkan nota resmi karena usaha tempat pembelian pisang tersebut tidak memiliki nota resmi. Sehingga untuk melengkapi laporan, Ni Kade Sri Purnawati selaku anggota pelaksana usaha *Banana Chips Lezat* mengakui membuat nota sendiri. Selain itu adanya tuntutan untuk membuat laporan agar jumlah pengeluaran sama dengan jumlah dana yang diterima menjadi suatu alasan tersendiri bagi mahasiswa untuk melampirkan dokumen transaksi fiktif. Diakui oleh mahasiswa sangat tidak mungkin pengeluaran untuk merintis usaha mau sama persis dengan jumlah total pendanaan dari PMW ini. Oleh karena itu, membuat nota sendiri menjadi salah satu alternatif agar jumlah pengeluaran sesuai dengan tuntutan panitia pelaksana PMW dalam menyusun laporan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap daftar penjualan yang dilampirkan oleh usaha BCL dan usaha *Coffee Campus Bali Agapada* laporan akhir, menunjukkan terdapat beberapa kesamaan seperti pada tanggal, orang yang membeli produk dan lainnya seperti yang telah dilingkari pada gambar diatas. Sangat tidak mungkin suatu penjualan pada jenis usaha yang berbeda memiliki kesamaan, sehingga dapat diyakini bahwa penjualan usaha yang dilampirkan oleh tim PMW dimanipulasi kebenarannya.

Tidak hanya itu, dalam proses pembuatan laporan mahasiswa juga meninggikan jumlah penjualan agar usaha yang dijalankan terkesan memperoleh laba. Hal ini sebagai dampak dari tidak terlaksananya usaha yang seharusnya dijalankan oleh mahasiswa. Akibat dari tidak maksimalnya pelaksanaan usaha membuat mahasiswa berupaya agar usaha yang dijalankan memperoleh pendapatan yang tinggi dengan memanipulasi jumlah penjualan. Dengan begitu, usaha yang dijalankan oleh mahasiswa terkesan berhasil dan sesuai dengan rencana bisnis yang telah diusulkan sebelumnya. Ini menunjukkan laporan yang dibuat oleh mahasiswa dalam hal pengelolaan dana PMW masih tidak sesuai dengan realita senyatanya dilapangan sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2013).

4. Tahap Pengawasan

Wujud dari adanya tahap pengawasan dalam PMW adalah dengan adanya monitoring yang dilakukan oleh panitia pelaksana PMW yang dilakukan sebanyak dua kali. Panitia pelaksana PMW berasal dari berbagai fakultas di Undiksha yang diikuti oleh 20 dosen. Meskipun telah dilakukan sebanyak dua kali, monitoring belum memberikan pengawasan bagi mahasiswa dalam pengelolaan keuangan. Ini terlihat dari masih tidak maksimalnya pelaksanaan usaha PMW yang kemudian berdampak pula pada kualitas laporan yang dihasilkan. Dalam proses monitoring, mahasiswa cenderung tidak mengungkapkan keadaan sebenarnya yang dialami saat merintis usaha. Mahasiswa juga berbohong tentang jumlah produksi, jumlah penjualan dan lainnya sehingga keadaan sebenarnya tidak terungkap dalam proses monitoring. Terlebih lagi, panitia yang melakukan monitoring juga cenderung langsung percaya dengan apa yang dikatakan mahasiswa tanpa mendalami lebih lanjut keadaan yang sebenarnya. Sehingga dapat dikatakan monitoring hanya sebagai formalitas dari serangkaian pelaksanaan PMW di Undiksha.

Selain itu, monitoring yang dilakukan oleh panitia dalam serangkaian PMW ini juga hanya berfokus pada pelaksanaan usaha saja dan tidak meyinggung tentang

pelaporan atas dana yang diterima tersebut. Ini dilakukan karena panitia menganggap bahwa pelaksanaan usaha merupakan kunci utama dalam PMW. Jika suatu usaha sudah melaksanakan usahanya dengan baik, maka mahasiswa juga akan mampu membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dengan baik kepada panitia pelaksana PMW. Karena dalam pelaksanaan usaha akan ditungkan dalam laporan seperti jumlah penjualan, jumlah produksi, bagaimana pendapatan yang dihasilkan dan bagaimana perkembangan usaha yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Ketika usaha yang dijalankan dapat beroperasi dengan baik, maka laporan yang dihasilkan juga akan baik pula.

Maraknya kegagalan usahanya yang terjadi dalam pelaksanaan PMW di Undiksha menunjukkan bahwa pelaksanaan tahap pengawasan belum terlaksana dengan baik. Ketidakterseriusan dalam melaksanakan pengawasan oleh panitia pelaksana PMW mengakibatkan mahasiswa lebih bebas dan seenaknya dalam melaksanakan program serta menggunakan dana yang diterima. Ini didukung dengan pengakuan oleh mahasiswa yang telah diwawancarai sebelumnya. Selain itu, dalam pembuatan laporan kemajuan dan laporan akhir yang memiliki banyak kesalahan tidak terlepas dari minimnya pengawasan dalam pelaksanaan program. Laporan yang dibuat merupakan cerminan dari usaha yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Jika usaha tidak mampu dilaksanakan dengan baik maka laporan yang dibuat mahasiswa sudah dipastikan tidak baik pula.

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada form monitoring yang digunakan oleh panitia dalam melaksanakan monitoring menunjukkan bahwa monitoring dilakukan untuk memantau pelaksanaan usaha. Pelaksanaan usaha ini kemudian dituangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan PMW sudah ada suatu bentuk pengawasan meskipun belum dapat berjalan dengan maksimal. Adanya monitoring sebagai bentuk pengawasan dan pendampingan usaha juga belum bisa dikatakan berhasil

karena masih banyak usaha yang gagal dan tidak lagi beroperasi. Ketika dalam pelaksanaan usaha saja mahasiswa tidak mampu mempertanggungjawabkan dengan baik maka sudah sewajarnya jika dalam laporan pertanggungjawaban berupa laporan kemajuan dan laporan akhir tidak dibuat dengan baik oleh mahasiswa penerima dana PMW. Ini dibuktikan dalam pembuatan laporan, mahasiswa masih menggunakan dokumen fiktif dan meninggikan jumlah produksi serta penjualan.

Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana PMW di Undiksha

Menurut Madiasmo (2012) meyakini bahwa akuntabilitas adalah kewajiban agen untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan laporan keuangan dan mengungkapkan segala aktivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sehingga akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban untuk melaporkan dan menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pihak yang lebih atas. Jika mengacu pada proses pengelolaan dana PMW di Undiksha, maka pertanggungjawaban dan pelaporan telah dilaksanakan oleh mahasiswa. Namun laporan serta pertanggungjawaban yang telah dilakukan dan dibuat oleh mahasiswa belum bisa dikatakan akuntabel karena mahasiswa belum mengungkap keadaan sebenarnya yang terjadi di lapangan karena masih adanya upaya untuk memalsukan dokumen transaksi dan memanipulasi jumlah penjualan. Jika dikaitkan dengan jenis akuntabilitas menurut Madiasmo (2012), maka dalam pengelolaan dana PMW dapat dianalisis sebagai berikut.

1. Akuntabilitas verikal
(pertanggungjawaban kepada atasan), maka dalam pengelolaan PMW mahasiswa sudah melakukan pertanggungjawaban tersebut dengan menyetorkan laporan kemajuan dan laporan akhir.
2. Akuntabilitas horizontal
(pertanggungjawaban kepada lembaga setara), maka dalam pengelolaan dana PMW mahasiswa sudah melakukan pertanggungjawaban tersebut karena

dalam pelaksanaan program hingga pada proses pelaporan diakui sudah semua anggota pelaksana usaha terlibat dan ikut andil didalamnya.

Jika dikaitkan dengan dimensi akuntabilitas menurut Mahmudi (2013), maka dalam pengelolaan dana PMW dapat dianalisis sebagai berikut.

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran. Dalam pembuatan laporan mahasiswa telah membuat laporan sesuai dengan yang diisyaratkan oleh panitia pelaksana PMW dan mengikuti contoh yang diberikan oleh panitia. Hanya saja dalam pembuatan laporan mahasiswa tidak mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dalam hal penjualan dan produksi. Selain itu, mahasiswa juga membuat dokumen fiktif karena tidak semua dana digunakan untuk merintis usaha. Dengan demikian mahasiswa masih belum bersikap jujur dalam pembuatan laporan.
2. Akuntabilitas Proses. Akuntabilitas proses terkait dengan adanya kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Dalam PMW, mahasiswa telah melaksanakan semua tahapan-tahapan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh UPT PKKMM selaku panitia pelaksana PMW mulai dari tahap perencanaan (menyusun rencana bisnis, seleksi), tahap pelaksanaan program (pelaksanaan usaha), tahap pelaporan dan pertanggungjawaban (adanya laporan kemajuan dan laporan akhir, serta tahap pengawasan (monitoring dan pendampingan usaha).
3. Akuntabilitas Program. Akuntabilitas Program yang terkait dengan pertanggungjawaban terhadap program yang telah dibuat. Dalam PMW, hal ini mengacu pada pelaksanaan dari usaha PMW. Pelaksanaan program PMW masih belum maksimal karena masih banyaknya usaha PMW yang tidak lagi beroperasi atau bahkan tidak beroperasi sejak awal. Ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan usaha dari rintisan program PMW masih sangat rendah

- dan tidak sesuai dengan pencapaian yang telah direncanakan pada saat menyusun rencana bisnis.
4. Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban kebijakan yang telah diambil dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam pelaksana PMW, kebijakan yang diambil oleh mahasiswa masih belum mempertimbangkan dampak dimasa depan. Mahasiswa tidak memfokuskan tentang keberlanjutan dari usaha rintisan PMW dan lebih memilih untuk memanfaatkan dana yang diterima untuk dibagi kepada anggota lainnya yang kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi. Ini terlihat dari mahasiswa yang mencoba menghemat pengeluaran dengan tidak membeli alat-alat yang menunjang produksi. Jika memang mahasiswa serius dalam mengikuti PMW maka pembelian alat-alat produksi menjadi prioritas utama bukan malah memanfaatkan dana yang diterima untuk keperluan pribadi anggotanya. Jika dalam PMW mahasiswa mempertimbangkan dampak dimasa depan, maka akan banyak usaha rintisan PMW yang masih bertahan hingga saat ini.
 5. Akuntabilitas Finansial terkait dengan pertanggungjawaban untuk menggunakan dana secara ekonomis, efisien dan efektif. Dalam pelaksanaan PMW, akuntabilitas finansial belum sepenuhnya dilaksanakan oleh mahasiswa karena tidak semua dana PMW digunakan untuk menjalankan usaha. Ada upaya untuk menghemat pengeluaran dengan tidak membeli beberapa alat dan menggunakan alat pribadi untuk menunjang usaha. Namun jika dana yang dihemat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, menurut peneliti bukan suatu tindakan yang tepat, terlebih PMW merupakan program yang seharusnya bisa memberikan dorongan bagi mahasiswa untuk merintis usaha.

Implikasi

Implikasi dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengungkap akuntabilitas pengeolaan dana PMW di Undiksha tahun 2019. Peneliti menemukan bahwa dalam pengelolaan dana PMW, mahasiswa telah melakukan pertanggungjawaban dan pelaporan atas dana yang diterima. Pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh mahasiswa penerima dana PMW tahun 2019 juga telah dilakukan dengan mengikuti prosedur dan tahapan yang telah disusun oleh panitia pelaksana PMW. Prosedur yang disusun berupa alur pelaksanaan program PMW yang telah terjadwal terdiri dari perencanaan (berupa penyusunan rencana bisnis dan seleksi), pelaksanaan (mahasiswa memulai untuk merintis usaha), pengawasan (adanya pendampingan usaha dan monitoring) serta pelaporan (dibuatnya laporan kemajuan dan laporan akhir).

Meskipun prosedur yang dirancang telah diikuti oleh mahasiswa dan mahasiswa juga telah melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban, nyatanya dalam proses pelaporan mahasiswa belum menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Dalam proses pelaporan, mahasiswa cenderung untuk meniggikan jumlah penjualan dan produksi serta membuat dokumen fiktif untuk melengkapi laporan yang dibuat. Hal ini terjadi karena pelaksanaan program yang tidak maksimal. Dana yang diterima dai PMW ini pun tidak sepenuhnya digunakan untuk melaksanakan program (merintis usaha). Ketika pelaksanaan program tidak maksimal, hal ini akan berdampak terhadap pengelolaan dana yang diterima yang kemudian berdampak pula pada kualitas laporan yang dihasilkan oleh mahasiswa dalam program PMW ini.

Pengawasan berupa monitoring dan pendampingan usaha yang dilakukan tidak berhasil memberikan *control* bagi mahasiswa dalam pelaksanaan usaha. Monitoring yang dilakukan hanya untuk memantau secara sekilas usaha yang dijalankan oleh mahasiswa tanpa ada upaya untuk mendalami lebih jauh pelaksana usaha tersebut. Sehingga banyak dari mahasiswa penerima dana PMW setengah hati dalam menjalankan

usahanya. Kunci dari akuntabilitas dalam pengelolaan dana PMW terletak pada pelaksanaan usaha. Ketika pelaksanaan usahanya baik, maka pengelolaan dana yang ada juga akan baik dan ketika disajikan dalam laporan maka tidak akan ada lagi upaya untuk meninggikan jumlah penjualan serta membuat dokumen fiktif.

Secara terperinci implikasi dari dilakukannya penelitian ini adalah ditemukannya bukti konkret dalam PMW bahwa pengelolaan dana PMW masih belum menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas. Adanya upaya untuk meninggikan jumlah penjualan atau produksi serta membuat dokumen fiktif merupakan salah satu bentuk ketidaksesuaian prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana PMW. Hal ini dilakukan untuk menutupi kenyataan bahwa dana yang diterima dalam PMW tidak sepenuhnya digunakan untuk menjalankan usaha. Minimnya pengawasan yang dilakukan menjadi salah satu faktor mahasiswa mampu melakukan tindakan-tindakan tersebut. Perlu ada upaya untuk memperbaiki pelaksanaan PMW dari segi pengelolaan keuangan baik oleh mahasiswa maupun panitia pelaksana PMW sehingga dana yang dihimpun untuk PMW dapat direalisasikan dengan baik dan sesuai dengan tujuan diadakannya program PMW.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban, maka sudah ada pertanggungjawaban dalam pengelolaan dana Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) di Undiksha. Mahasiswa selaku *agent* telah melakukan pertanggungjawaban kepada UPT PKKMs selaku *participal*. Pertanggungjawaban ini dibuktikan dengan adanya laporan akhir dan laporan kemajuan yang telah dikumpul oleh mahasiswa dalam proses pelaksanaan program PMW. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh mahasiswa mengikuti dari prosedur yang ditetapkan oleh UPT PKKMs mulai dari perencanaan (menyusun rencana bisnis), pelaksanaan usaha, pelaporan (pengumpulan laporan kemajuan dan laporan akhir), dan pengawasan

(adanya monitoring dan pendampingan usaha). Ini mencerminkan bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan dalam PMW terdiri dari dua jenis yaitu pertanggungjawaban vertikal (pertanggungjawaban kepada UPT PKKMs selaku panitia pelaksana PMW) dan pertanggungjawaban horizontal (pertanggungjawaban kepada sesama anggota pelaksana usaha karena semua anggota telah terlibat dalam pelaksanaan usaha).

Dalam kaitannya dengan pengelolaan dana, mahasiswa masih belum mampu bertindak sesuai dengan kepentingan *steward* dalam hal ini UPT PKKMs selaku panitia pelaksana PMW. Adanya ketidaksesuaian antara hasil usaha dengan rancangan bisnis menjadi bukti bahwa mahasiswa tidak melaksanakan PMW dengan maksimal. Disamping itu, mahasiswa juga melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan ketidaksesuaian kenyataan di lapangan dengan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Ketidaksesuaian ini berupa adanya peninggian jumlah produksi sehingga jumlah dana yang digunakan dalam melaksanakan program terkesan tinggi, adanya peninggian jumlah penjualan sehingga jumlah pendapatan dari melaksanakan program terkesan tinggi serta adanya upaya membuat dokumen fiktif untuk melengkapi laporan karena dana yang diterima tidak seluruhnya digunakan untuk melaksanakan usaha. Dengan demikian, dalam penelitian ini mahasiswa masih belum menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas khususnya dimensi akuntabilitas dalam pengelolaan dana PMW.

Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yang ditujukan kepada panitia pelaksana PMW, mahasiswa penerima dana PMW, dan kepada peneliti yang melakukan penelitian sejenis selanjutnya.

1. Kepada UPT PKKMs, adapun beberapa hal yang harus diperbaiki dalam proses pelaksanaan PMW diantaranya: besaran modal yang diberikan kepada mahasiswa hendaknya mengikuti dari jenis usaha yang dirintis sehingga tidak

ada lagi mahasiswa yang tidak mampu menjalankan usaha karena modal yang diberikan tidak mencukupi. Harus ada konsistensi antara panduan dan realisasi terkait dengan nominal minimal modal yang diberikan kepada mahasiswa dalam PMW. Sera memperketat pelaksanaan monitoring dan pendampingan usaha. Monitoring merupakan salah satu bentuk pengawasan dalam pelaksanaan program PMW. Selama ini, adanya monitoring masih dipandang sebagai formalitas semata oleh mahasiswa sehingga tidak memberikan suatu batasan bagi mahasiswa ketika melaksanakan usaha. Pelaksanaan usaha yang belum maksimal dari PMW ini sendiri tidak terlepas dari kelonggaran dalam hal pengawasan.

2. Kepada mahasiswa penerima dana PMW agar dapat meningkatkan kesadaran bahwa PMW merupakan suatu program untuk merintis usaha. Dana yang diterima sepenuhnya digunakan untuk menjalankan usaha, sehingga operasional usaha akan berjalan dengan baik dan tidak ada lagi upaya-upaya untuk meninggikan jumlah produksi maupun jumlah penjualan. Selain itu, mahasiswa juga harus lebih meningkatkan kualitas laporan yang dibuat, sehingga tidak ada lagi upaya-upaya untuk memalsukan dokumen transaksi.
3. Kepada peneliti selanjutnya, dalam penelitian ini diungkap bahwa pengelolaan keuangan PMW oleh mahasiswa masih belum maksimal. Selain itu, banyak dari usaha rintisan PMW yang tidak berjalan dengan baik sehingga keberhasilan usaha dari PMW di Undiksha masih sangat minim. Oleh karena itu, kedepannya perlu dilakukan penelitian tentang PMW yang memfokuskan pengelolaan keuangan dalam menunjang keberhasilan usaha rintisan PMW di Undiksha.

DAFTAR RUJUKAN

Donaldson & Davis. 1991. *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO*

Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Pedoman Program Mahasiswa Wirausaha (PMW)*. Diakses pada tanggal 28 Desember 2019. <http://ldikti3.ristekdikti.go.id/html/wp-content/uploads/2014/03/B1.-Pedoman-PMW-2013.pdf>.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.

Madiasmu. 2012. *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang *Good Governance*.

Setiawan, Dendi. 2016. *Evaluasi Pelaksanaan Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) Dirjen Dikti Kemendikbud (Studi Kasus Di Universitas Andalas Tahun Anggaran 2009)*. Diakses tanggal 2 Mei 2020. <http://scholar.unand.ac.id/5454>.

Sugiyono 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Unit Pelaksanaan Teknis Pengembangan Karier dan Kewirausahaan Undiksha. 2019. *Pengumuman Lulus Seleksi PMW Tahun 2019*.

Wheelen & Hunger (2004). *Strategic Management And Business Policy*. Pearson Prentice Hall, New Jersey.